

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan penduduk di Indonesia berkembang sangat pesat seperti pertumbuhan dan perkembangan tindak pidana juga semakin meningkat pula, salah satunya masalah yang sangat serius yang melanda banyak negara seperti Singapura, Cina termasuk Indonesia adalah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, karena hampir semua lapisan masyarakat bisa ditembus jaringan peredaran narkoba yang dapat merugikan bangsa. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika ini merupakan salah satu masalah serius yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia, karena dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan psikotropika tersebut. Dampak negatif yang dialami para korban menghalangi mereka untuk berperan aktif dalam memberikan kontribusi dalam proses pembangunan dan melanjutkan proses regenerasi yang berkualitas bagi bangsa Indonesia.

Di Indonesia kasus – kasus yang berkaitan dengan peredaran ataupun penyalahgunaan narkoba dan psikotropika seperti tidak ada habisnya. Sudah tidak terhitung cara yang dilakukan serta biaya yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk memberantas peredaran serta penyalahgunaan narkoba dan psikotropika ini. Tetapi hingga saat ini, peredaran narkoba dan psikotropika

masih saja dijumpai. Bahkan peredarannya sekarang ini tidak hanya berada di kalangan masyarakat metropolitan saja, tetapi sudah merambah hingga ke daerah pedalaman dan sekolah-sekolah. Tentu saja penyebaran narkoba dan psikotropika ini sangat meresahkan dan mengganggu bagi kehidupan dan masa depan masyarakat.

Pada awalnya Narkoba dan Psikotropika merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediaannya perlu dijamin. Hal ini sejalan dengan pernyataan M. Arief Hakim, yaitu :

“Narkoba memunculkan sekian banyak madharat dan (nyaris) tidak ada manfaatnya. Beberapa jenis narkoba hanya ada manfaatnya jika dipakai untuk keperluan ilmu pengetahuan, pengobatan, dan medis. Syaratnya harus dalam pengawasan ahlinya yang berkompeten secara ketat dan terarah. pemakainya pun sangat terbatas dan menurut petunjuk dokter. Di luar itu semua, maka narkoba bisa merusak fisik dan psikis, raga dan jiwa. Narkoba juga sangat dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan.”¹

Akan tetapi, akibat dari tindakan sebagian orang, narkoba dan psikotropika disalahgunakan, hingga saat ini seluruh dunia sepakat bahwa penyalahgunaan narkoba dan psikotropika merupakan tindak pidana/ kejahatan internasional. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan obat ialah pemakaian obat tanpa

¹ Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkoba, Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*, Cetakan Pertama, Nuansa, Bandung, Hlm 70-71.

petunjuk medis.² Upaya pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika telah sejak lama dilakukan. Bahkan konferensi pertama psikotropika telah dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 1971 hingga 21 Februari 1971 yang dilaksanakan oleh *The United Nations Conference for the Adoption of Protocol on Psychotropic Substance* di Wina, Austria.³ Konferensi ini menghasilkan *Convention Psychotropic Substance* 1971, yang isinya mengatur kerja sama internasional dalam pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan psikotropika, serta mencegah, pemberantasan penyalahgunaannya dengan membatasi penggunaan hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Latar belakang penegakan hukum terhadap narkoba dan psikotropika didasarkan atas suatu asumsi bahwa terdapat korelasi antara para pelaku penyalahgunaan narkoba dan psikotropika ini dengan sikap negatif yang di timbulkan, antara lain mempunyai sikap dan tingkah laku yang cenderung memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal.⁴ Selain itu sifat dari masalah yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba dan psikotropika ini bersifat multidimensi karena meliputi dimensi kesehatan, dimensi ekonomi, dimensi sosial dan pendidikan, dimensi kultural, dimensi keamanan nasional, dimensi penegakan hukum. Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika memiliki dampak yang membahayakan terhadap kondisi fisik,

² Hadiman, 2005, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, Hlm 5.

³ Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 1.

⁴ Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 6.

terhadap mental dan terhadap sosial si pelaku. Selain faktor dari diri sendiri, seseorang yang terlibat ke dalam narkoba dan psikotropika juga bisa disebabkan oleh faktor lingkungan, faktor keluarga dan banyak faktor lainnya.

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang – kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain pelanggaran terhadap norma - norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Masyarakat selalu berusaha mengadakan pembaharuan – pembaharuan di segala bidang. Kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, tetapi juga dapat berdampak negatif. Maksudnya dengan kemajuan teknologi, juga ada masalah peningkatan kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum.

Tantangan ini juga dialami oleh aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia tentu saja merupakan elemen yang pertama kali ataupun yang secara langsung bersinggungan dengan para pelaku kejahatan. Hal ini sesuai dengan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasar Pasal 2 Undang-Undang

Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 2 tersebut yang menjadi fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.. Tantangan yang dihadapi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak saja datang dari luar institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, tapi juga dari dalam institusi tersebut. Faktor eksternal disini, selain semakin kuatnya jaringan pengedar, kurangnya peran serta dari lingkungan juga memberi andil dalam lemahnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika. Faktor internal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjadi salah satu tantangan dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika, bahkan menjadi salah satu faktor utama. Faktor internal yang dimaksud disini, antara lain profesionalitas aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagai kejahatan yang angkanya selalu meningkat dari tahun ke tahun, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika merupakan target utama dari proses pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya dalam mengurangi peningkatan angka kejahatan narkoba dan psikotropika tersebut, telah banyak dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia baik secara represif maupun preventif. Selain itu sanksi yang diancamkan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dan

psikotropika di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sangat berat. Akan tetapi semua upaya tersebut seakan tidak mampu mengurangi peningkatan kejahatan tersebut. Menurut data Badan Narkotika Nasional, angka penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang berhasil diungkap Kepolisian Negara Republik cenderung meningkat lebih dari 5%, hanya pada rentang 2009 hingga 2010 mengalami penurunan sebesar 13%.⁵ Di wilayah Sumatera Utara, yang termasuk dalam 5 besar penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, mengalami peningkatan lebih dari 200 kasus setiap tahunnya.⁶ Sebagai daerah yang letaknya cukup strategis karena merupakan jalur persinggahan dan dilalui oleh jalur Lintas Sumatera, Kabupaten Toba Samosir termasuk daerah yang rawan bagi penyebaran narkotika dan psikotropika. Kabupaten Toba Samosir merupakan salah satu pemberi sumber terbesar angka peningkatan tindak pidana narkotika dan psikotropika, dan terbagi dalam 3 wilayah besar yaitu Balige, Porsea dan Laguboti. Hal ini terbukti dengan adanya data dari Badan Narkotika Kabupaten Toba Samosir yang menyebutkan 65% lebih tahanan di Polres Tobasa terkait dengan narkotika dan psikotropika.⁷

⁵ <http://www.bnn.go.id/arsip/data-tindak-pidana-narkoba/data-tindak-pidana-narkoba-tahun-2007-2013.html>, Data Tindak Pidana Narkoba Tahun 2007 – 2013, 20 Maret 2014

⁶ <http://www.bnn.go.id/arsip/data-tindak-pidana-narkoba/data-tindak-pidana-narkoba-provinsi-sumatera-utara-tahun-2007-2013.html>, Badan Narkotika Nasional, Data Tindak Pidana Narkoba Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007-2013, 10 Maret 2014

⁷ <http://www.pemkab Tobasa.co.id/news/bnk-tobasa-lakukan-sosialisasi-bahaya-narkoba/bagian-humas-dan-protokol-setdakab-tobasa>, Kasat Narkoba Polres Tobasa : Enam Puluh Lima Persen Tahanan Polres Tobasa Adalah Yang Terkait Kasus Narkoba, 20 Maret 2014

Dari beberapa fakta tersebut, timbul pertanyaan mengapa penyalahgunaan narkoba dan psikotropika selalu meningkat khususnya di Kabupaten Toba Samosir. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti akan membahas lebih mendalam dalam usulan penelitian yang berjudul **“Upaya Kepolisian Resort Toba Samosir Dalam Proses Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika di Kabupaten Toba Samosir.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang timbul dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya dari Kepolisian Resort Toba Samosir dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika ?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Toba Samosir dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui peranan dari Kepolisian Resort Toba Samosir dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika.

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Toba Samosir dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan sumbangan pemikiran tentang aturan narkoba, psikotropika dan kepolisian pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran :

a) Bagi masyarakat

Sebagai pengetahuan agar masyarakat lebih mengerti dan memahami mengenai bagaimana kinerja dan langkah - langkah pihak kepolisian dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika serta hambatan – hambatannya.

b) Bagi Kepolisian Republik Indonesia

Sebagai referensi dan informasi bagi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dapat membantu dalam proses pencegahan & pemberantasan tindak pidana narkoba dan

psikotropika khususnya di wilayah hukum di wilayah hukum Kepolisian Resort Toba Samosir.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Upaya Kepolisian Resort Toba Samosir dalam Proses Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Kabupaten Toba Samosir” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri. Berdasarkan penelusuran baik melalui media internet maupun pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, belum ada karya ilmiah dengan judul dan lokasi penelitian yang sama seperti yang diteliti sehingga penelitian ini adalah karya asli penulis dan bukan hasil duplikasi atau plagiasi dari karya atau hasil penelitian lain. Beberapa penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pembanding bagi peneliti ialah :

- a) Penelitian Boy Anderson Hutapea, Nomor Mahasiswa 020508005, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2009, menulis skripsi dengan judul Upaya Poltabes dalam Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Psikotropika di Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan ialah bagaimana upaya poltabes yogyakarta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika; serta kendala - kendala apa saja yang dihadapi poltabes yogyakarta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika di yogyakarta. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana upaya

poltabes yogyakarta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika; serta untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi poltabes yogyakarta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika di yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut ialah upaya yang dilakukan poltabes Yogyakarta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika terdiri dari upaya preventif dan upaya repressif. Yang menjadi kendalanya pembeli dan penjual sulit dilacak; masih rendahnya sumber daya manusia terhadap masalah psikotropika dan penggunaan peralatannya (teknologi); jaringan yang rapi; alat-alat utama sistem psikotropika di poltabes yogyakarta masih belum memadai dan minim; serta partisipasi masyarakat masih rendah; ditambah dengan pendanaan yang kurang memadai.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada obyek penelitian dan tempat penelitiannya.

- b) Penelitian David Brain Kasidy Marpaung, Nomor Mahasiswa 070509759, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2013, menulis skripsi dengan judul Polri dalam memberantas tindak pidana narkoba di provinsi DIY. Rumusan masalah yang diajukan ialah bagaimana implementasi kepolisian negara Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana narkoba di provinsi DIY; Apa kendala kepolisian negara Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana narkoba di provinsi DIY. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data mengenai kepolisian negara Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana

narkotika di provinsi DIY; untuk memperoleh data mengenai kendala kepolisian negara Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana narkotika di provinsi DIY. Hasil dari penelitian tersebut ialah cara polda DIY dalam memberantas tindak pidana narkotika di provinsi DIY ada 2 sisi; Upaya polda DIY pada praktek lapangan dan upaya polda DIY dalam keseluruhan; Kendala polda DIY dalam memberantas tindak pidana narkotika di provinsi DIY ialah kurangnya jumlah dan prasarana serta kurangnya kesadaran masyarakat atau takut dalam melapor adanya tindak pidana narkotika kepada Ditresnarkoba Polda DIY.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada obyek penelitian dan tempat penelitiannya.

- c) Penelitian Elya EKa Handayani, Nomor Mahasiswa 060509364, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2013, menulis skripsi dengan judul Peranan penyidik polri dalam pencegahan tindak pidana narkotika setelah dikeluarkannya UU Nomor 35 thn 2009. Rumusan masalah yang diajukan ialah bagaimana peranan penyidik Polri dalam pencegahan tindak pidana narkotika setelah dikeluarkannya UU Nomor 35 thn 2009; hambatan apa yang ditemui penyidik polri dalam pencegahan tindak pidana narkotika setelah dikeluarkannya UU Nomor 35 thn 2009. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tentang peranan penyidik polri dalam pencegahan tindak pidana narkotika setelah dikeluarkannya UU Nomor 35 thn 2009; Untuk mengetahui hambatan apa yang ditemui penyidik polri dalam pencegahan tindak pidana narkotika setelah

dikeluarkannya UU Nomor 35 thn 2009. Hasil dari penelitian tersebut ialah Peranan penyidik polri dalam pencegahan tindak pidana narkoba setelah dikeluarkannya uu Nomor 35 thn 2009 adalah sebagai penyidik pembantu BNN; hambatan yang dihadapi ialah besarnya biaya yang dibutuhkan dalam mencari barang bukti dan pengujian terhadap alat bukti.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada obyek penelitian.

F. Batasan Konsep

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti dengan judul “Upaya Kepolisian Resort Toba Samosir Dalam Proses Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika di Kabupaten Toba Samosir”, maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut :

1. Pengertian Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah usaha; ikhtiar (memecahkan persoalan; mencari jalan keluar).
2. Pengertian Kepolisian menurut undang-undang Nomor 2 tahun 2002 ialah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Resort menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah daerah kecil; daerah kuasa atau lingkungan kerja.
4. Proses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah runtutan perubahan; rangkaian tindakan.

5. Pencegahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perbuatan mencegah; penolakan.
6. Pemberantasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah proses memberantas.
7. Tindak pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perbuatan pidana.
8. Narkotika menurut undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
9. Psikotropika menurut undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika ialah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang ada untuk mengetahui secara langsung

tindakan-tindakan serta kendala-kendala Kepolisian Resort Toba Samosir dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Kabupaten Toba Samosir.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah berupa data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

a. Data primer :

Suatu data yang bersumber atau didapat di lapangan yang meliputi : hasil wawancara dengan responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti.

b. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang terkait dengan permasalahan yang diteliti antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- e) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder :

Berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, dan makalah.

3) Bahan Hukum Tersier :

Berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus-kamus tentang bahasa hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendapatkan data primer dilakukan studi lapangan suatu cara pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden dan narasumber, juga pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi yang jelas dan benar berkaitan dengan obyek yang sedang diteliti. Wawancara tersebut dilakukan secara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.
- b. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan studi kepustakaan, dengan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen dan sumber lain yang berkaitan dengan obyek dalam penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Merupakan tempat atau daerah yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan, meliputi :

- a. Kepolisian Resort Toba Samosir

- b. Badan Narkotika Kabupaten Toba Samosir

5. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

a. Populasi

Merupakan keseluruhan obyek penelitian, yaitu kepolisian khususnya Polres Tobasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika, beserta kendala-kendalanya.

b. Metode Penentuan Sampel

Dari populasi tersebut lalu ditarik suatu sample dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu dengan memilih sebagian populasi dari keseluruhan populasi yang ada sebagai perwakilan, ditentukan berdasarkan ciri-ciri dan karakter tertentu yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.

6. Responden dan Narasumber

Responden dan narasumber dalam penelitian ini adalah subyek yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, yaitu aparat Polres Tobasa, BNK Tobasa dan masyarakat.

7. Metode Analisis Data

Keseluruhan data dari hasil penelitian baik yang diperoleh di lapangan, maupun dari kepustakaan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni perolehan data tersebut disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian dengan menggunakan metode berpikir induktif didapatkan kesimpulan yang bersifat umum berdasar pada suatu hal (fakta-fakta) yang bersifat khusus.